



Terpaksa Geser Anggaran

SEKOLAH-SEKOLAH terpaksa mengurangi kegiatan yang menyedot biaya besar guna digeser untuk membiayai pembelajaran jarak jauh.

Tak hanya di sekolah swasta, di sekolah negeri pun terpaksa melakukan pergeseran anggaran. Intinya, langkah ini dilakukan demi terselenggaranya proses belajar mengajar.

Di SMP Negeri 1 Yogyakarta misalnya, sebanyak 50 persen kegiatan sekolah yang memakan anggaran besar terpaksa

dipangkas.

Pemangkasannya tersebut kemudian direalokasikan untuk kegiatan PJJ.

"Ada pengurangan kegiatan untuk realokasi ke PJJ. Ya sekitar 50 persen lah kami rombak," kata Kepala SMP Negeri 1 Yogyakarta Niken Sasanti, Senin (31/8) lalu.

Ia menambahkan, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-

● ke halaman 11

Terpaksa Geser Anggaran

● Sambungan Hal 1

nya sejauh ini masih berjalan dengan lancar.

"Ya karena kami kurang kegiatan yang memakan anggaran banyak, Alhamdulillah lancar saja," ungkapnya.

Dirinya kini masih menanti peluncuran dana BOS tahap ketiga yang diperkirakan akan turun September-Oktober.

Terpisah, Kepala SMAN 11 Kota Yogyakarta, Rudy Rumanto pun menunggu penca-

iran dana BOS tahap ketiga untuk menopang operasional sekolah.

Di tengah pandemi Covid-19 kali ini, petunjuk dan teknis penyaluran dana BOS banyak yang berubah.

Dari Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang ada, Rudy harus merombak dan memprioritaskan keperluan untuk proses PJJ.

"Prioritasnya untuk beli kuota dan sebagainya. Termasuk penunjang Lab khusus bagi siswa yang tidak memiliki handphone serta yang keterbatasan sinyal atau kuota," imbuhnya.

Ia melanjutkan, anggaran

dana BOS tahap pertama dan tiga di SMA negeri 11 sebanyak Rp307 juta.

Sedangkan anggaran dana BOS tahap dua, kata Rudy, hampir mencapai Rp700 juta.

Meski cukup besar, pihaknya lebih memprioritaskan anggaran tersebut untuk proses kegiatan belajar para siswa.

Sementara untuk menggaji para guru tidak tetap (GTT), mereka mengandalkan iuran komite.

"Memang bisa untuk menggaji para GTT, tapi GTT kami ada yang belum memiliki NUP-TK, sementara kendala kami hanya di situ, sehingga gaji me-

reka diambilkan dari uang komite," terang dia.

Rudy merinci untuk tahap pertama, penggunaan kuota belajar para siswa selama satu bulan mencapai Rp50 juta.

Sementara tahap berikutnya yakni Agustus-September kemarin sebanyak Rp100 juta.

Pihaknya mengaku kebingungan lantaran informasi yang ia dapat, program PJJ di DIY masih akan diperpanjang hingga Desember.

"Untuk beberapa bulan ke depan setelah bulan Agustus-September atau tahap dua dan tiga selesai ini kami belum ada alokasi lagi," ungkapnya. (uti/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005